



ANALISA

February 26, 2026

Vol. 0005

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi : Pinterest



Zainul Abidin

Research Associate -
The Reform Initiatives (TRI)

Pertumbuhan Tanpa Kesejahteraan: Ilusi Penguatan Ekonomi 5,11%

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 mencapai 5,11 persen terdengar meyakinkan di tengah ketidakpastian global. Capaian tersebut disebut sebagai bukti ketangguhan ekonomi nasional. Namun, di ruang-ruang makan rumah tangga, narasinya berbeda. Banyak keluarga merasa penghasilan tak lagi cukup panjang untuk menutup bulan. Pertanyaannya sederhana: jika ekonomi tumbuh, mengapa rasa aman finansial justru menyusut?

Paradoks ini tidak lahir dari perasaan semata. Ia memiliki fondasi struktural yang bisa ditelusuri dari cara pertumbuhan itu terbentuk, siapa yang menikmatinya, dan bagaimana dampaknya didistribusikan.

Secara agregat, Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,11 persen pada 2025. Namun, motor penggeraknya tidak lagi bertumpu pada konsumsi rumah tangga seperti lazimnya ekonomi Indonesia. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, ada 4 kontributor utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025, berdasarkan sisi produksi. Keempat kontributor itu adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, serta informasi dan telekomunikasi. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah laju PDB.

Ini bukan sekadar detail teknis. Konsumsi rumah tangga adalah fondasi pemerataan kesejahteraan. Ketika ia tumbuh lebih lambat dari PDB, artinya nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya mengalir ke kantong mayoritas masyarakat. Pertumbuhan tetap terjadi, tetapi distribusinya menjadi timpang.

Lebih jauh, lonjakan pada kuartal IV 2025 sangat dipengaruhi stimulus fiskal akhir tahun dan momentum musiman. Artinya, ada unsur temporer yang mempercantik angka tahunan. Tanpa belanja pemerintah yang akseleratif, performanya mungkin tidak setinggi itu.

Kita perlu jujur: pertumbuhan berbasis ekspor dan sektor padat modal memang baik untuk stabilitas makro. Namun, jika tidak disertai penciptaan pekerjaan formal bernilai tambah tinggi, ia hanya menguatkan lapisan atas tanpa memperkuat fondasi sosial.

Tahun	Pertumbuhan PDB (%)	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%)	Selisih (PDB - Konsumsi)
2023	5.05	4.82	0,23
2024	5.03	4.91	0,12
2025	5.11	4.98	0,13

(diolah dari data BPS)

Inflasi Pangan dan Upah Riil yang Terkikis

Inflasi umum 2025 tercatat terkendali. Tetapi inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau jauh lebih tinggi dan menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Bagi rumah tangga berpendapatan menengah dan bawah, porsi belanja pangan sangat besar. Kenaikan harga di sektor ini bersifat regresif, dimana beban paling berat justru ditanggung mereka yang penghasilannya paling terbatas.

Upah nominal memang naik. Namun ketika inflasi pangan melaju lebih cepat, yang terjadi adalah penurunan upah riil. Secara statistik pendapatan bertambah, tetapi daya belinya menyusut.

Di sinilah jarak antara angka resmi dan persepsi publik melebar. Inflasi agregat mungkin rendah, tetapi biaya hidup riil, seperti; sekolah swasta, premi kesehatan, cicilan kendaraan, maupun biaya lainnya sering kali meningkat lebih cepat daripada angka headline. Keranjang belanja statistik tidak selalu mencerminkan realitas kelas menengah perkotaan.

Kemudian, fenomena paling mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir adalah penyusutan kelas menengah. Data menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun signifikan sejak 2019 hingga 2024, dan tekanan biaya hidup pada 2025 mendorong sebagian dari mereka turun ke kategori “Menuju Kelas Menengah”. Fenomena ini dikenal sebagai middle-class squeeze. Kelas menengah

tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menahan lonjakan biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Mereka menjadi pembayar pajak yang patuh, tetapi merasa tidak mendapatkan bantalan kebijakan yang memadai.

Ini bukan sekadar isu ekonomi. Kelas menengah adalah mesin konsumsi, basis pajak, dan penopang stabilitas sosial. Jika segmen ini terus tergerus, fondasi pertumbuhan jangka panjang ikut melemah.

Lebih dari itu, kecemasan mereka bukan hanya soal angka. Ia bersifat psikologis dan struktural. Ketika pekerjaan formal semakin sulit dan biaya hidup terus naik, rasa aman masa depan ikut memudar.

Tahun	Jumlah Kelas Menengah (Juta Orang)	Proporsi terhadap Total Penduduk (%)
2019	57,33	21,45
2021	53,83	19,82
2023	48,27	17,44
2024	48,85	17,13
2025)	47,10	16,80

(Diolah dari data BPS)

Pekerja Informal dan Hutang Sebagai Penopang Daya Beli

Jumlah penduduk bekerja memang meningkat. Namun proporsi pekerja informal tetap dominan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lapangan kerja baru tercipta di sektor informal dan ekonomi platform. Sektor gig berkembang pesat, tetapi rata-rata pendapatannya justru menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Kondisi ini melahirkan kelas pekerja “precariat”: memiliki pekerjaan tetapi tanpa kepastian kontrak, jaminan sosial terbatas, dan risiko ekonomi sepenuhnya ditanggung individu. Mereka bekerja setiap hari, tetapi hidup dalam ketidakpastian finansial yang konstan.

Di sinilah kualitas pertumbuhan perlu dipertanyakan. Menciptakan pekerjaan saja tidak cukup; yang dibutuhkan adalah pekerjaan dengan upah layak dan perlindungan sosial memadai. Tanpa itu, pertumbuhan hanya memperluas lapangan kerja rentan.

Di tengah tekanan pendapatan dan kenaikan harga, rumah tangga mulai bertumpu pada pembiayaan digital. Outstanding pinjaman P2P lending menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp94,85 Triliun pada November 2025. Sementara itu, pertumbuhan simpanan masyarakat berpendapatan kecil melambat dan terjadi erosi tabungan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Desember 2025 hanya tumbuh 3,43%, sementara saldo tabungan di atas Rp5 miliar ini tumbuh cukup tinggi yakni 22,76%.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumsi sebagian masyarakat bertahan bukan karena kenaikan pendapatan, melainkan karena akses hutang. Jika konsumsi dipertahankan melalui pinjaman, maka pertumbuhan menjadi rapuh. Ia bergantung pada masa depan yang digadaikan.

Ini bukan alarmisme. Ini pembacaan struktural. Ketika daya beli ditopang oleh cicilan, setiap guncanga, seperti PHK, sakit, kenaikan harga dapat menjatuhkan rumah tangga ke jurang kerentanan.

Menuju Pertumbuhan yang Lebih Berkualitas

Ada tiga alasan utama mengapa pertumbuhan 5 persen terasa hambar bagi banyak orang. Pertama, distribusi nilai tambah. Pertumbuhan PDB dihitung dari nilai produksi, tetapi keuntungan sering terkonsentrasi pada pemilik modal atau sektor padat modal dengan daya serap tenaga kerja terbatas. Upah tidak selalu naik sebanding dengan laba.

Kedua, perbedaan antara inflasi statistik dan biaya hidup riil. Keranjang konsumsi resmi tidak selalu mencerminkan beban aktual kelas menengah.

Ketiga, faktor sosial-psikologis. Di era digital, kesenjangan terlihat lebih jelas. Ketika gaya hidup mewah terekspos setiap hari, rasa ketidakadilan menjadi lebih tajam, meskipun secara nominal pendapatan meningkat sedikit.

Pertumbuhan 5 persen bukanlah kegagalan. Namun ia belum cukup jika tujuannya adalah kesejahteraan luas dan visi Indonesia Maju 2045. Tanpa kelas menengah yang kuat, konsumsi domestik akan rapuh dan basis pajak masa depan menyusut.

Reorientasi kebijakan diperlukan. Revitalisasi industri manufaktur untuk menciptakan pekerjaan formal bernilai tambah tinggi harus menjadi prioritas. Reformasi perlindungan sosial perlu mencakup segmen “Menuju Kelas Menengah”, termasuk asuransi pengangguran yang lebih efektif. Pengendalian inflasi pangan secara struktural melalui perbaikan rantai pasok harus memastikan upah riil tidak terus tergerus. Regulasi pembiayaan konsumtif juga perlu diperketat agar tidak berubah menjadi jebakan utang.

Namun di atas semua itu, perubahan paling mendasar adalah cara kita mengukur keberhasilan. Apakah cukup dengan angka PDB? Ataukah kita perlu menilai kualitas pertumbuhan dari seberapa banyak rumah tangga yang merasa aman, bukan cemas?

Pertumbuhan 5 persen mungkin cukup untuk laporan makro dan presentasi investor. Tetapi bagi jutaan keluarga, yang mereka cari bukan grafik naik melainkan ruang bernapas di akhir bulan. Jika ekonomi tumbuh tetapi rasa aman menyusut, maka yang perlu kita perbaiki bukan semata kecepatannya, melainkan arahnya.